

Majalah Ilmiah

ISSN: 1410-53

# ANIDA

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Ushuliyah  
FAK. DAQWAH IAIN 'SGD' BANDUNG

## Titik Kontinum Pengembangan Profesi Dakwah

*Asy-Komariah - Hapsy-Engras - Asy-Azzam-Salimawati  
Al-Nopdan - Kurniati-Surabaya - Laila-Sarrah - Akhdul-Rasid  
Laila-Surabaya - Asy-Syadique*

Volume 8 No.2 Tahun 2009

**Konseling Sebagai Profesi Pekerjaan Sosial  
(Analisa atas Dimensi Nilai dalam Filsafat Etika)**

**Dudy Imanuddin E**

*Profesi konseling memiliki dimensi nilai social yang kental. Dalam proses perwujudannya dimensi itu lahir sebagai konsekuensi interaktif antara dirinya dengan lingkungannya. Profesi konseling menemukan jati dirinya setelah konstruk dirinya berinteraksi dengan tuntutan lingkungannya, di satu sisi semakin jelas dan tegas lingkup wilayah batas-batas profesinya dan di sisi lain pengakuan dan apresiasi lingkungan atas jaminan kesinambungan profesi yang bersangkutan.*

**Kata Kunci:**

Konseling, Pekerjaan Sosial, Profesi,  
Dimensi Nilai, dan Kode Etik

**Pendahuluan**

Kajian tentang nilai menjadi kajian yang amat penting mengingat posisinya sebagai masalah awal dalam filsafat etika. Selain itu, kajian nilai menjadi kajian yang menyentuh persoalan substansial dalam filsafat etika. Pertanyaan yang selalu muncul dalam kajian ini, apakah yang disebut “baik” dan “tidak baik”.

Terdapat dua aliran dalam kajian nilai (*values*) yakni aliran *naturalisme* dan *non-naturalisme*. Dalam pandangan *naturalisme*, nilai adalah sejumlah fakta yang dapat diuji secara empiris. Misalnya sifat perilaku yang baik seperti jujur, adil dan dermawan atau kebalikannya menjadi indikator untuk menentukan predikat seseorang berperilaku baik atau tidak baik. Pun demikian dengan konsekuensi dari setiap

perbuatan adalah indikator untuk menetapkan apakah perbuatan seseorang itu baik atau tidak baik.

Berbeda dengan *naturalisme*, aliran *nonnaturalisme* memandang bahwa nilai bukanlah sekedar fakta tetapi lebih bersifat normatif dalam menentukan sesuatu apakah ia baik atau buruk, benar atau salah. Nilai tidak hanya ditentukan oleh konsekuensi dari suatu perbuatan melainkan dipengaruhi oleh intuisi etika yang dimiliki manusia, sebuah kesadaran langsung adanya nilai murni seperti benar atau salah dalam setiap perilaku, objek atau seseorang.

Immanuel Kant sebagai tokoh kelompok *non-naturalisme* mengemukakan prinsip *autonomy* dan *heteronomy* dalam menentukan etikaitas. *Autonomy* merupakan wujud otonomi kehendak (*the autonomy of the will*). Seseorang melakukan perilaku etika berdasar atas kehendak (*the will*) -yang telah menjadi ketetapan bagi dirinya untuk melakukan perilaku etika dan tidak ditentukan oleh kepentingan atau kecenderungan lain.

Sedangkan *heteronomy* atau disebut juga prinsip heteronomi kehendak (*the heteronomy of will*) menyatakan bahwa seseorang berperilaku etika karena dipengaruhi oleh berbagai hal di luar kehendak manusia. Pada prinsip ini, kehendak (*the will*) tidak serta merta menjadikan dirinya sebagai sebuah ketetapan (*the law*), tetapi sebuah ketetapan diberikan oleh objek tertentu melalui kaitannya dengan kehendak (*the will*).

Perilaku etika yang ideal dalam kacamata Immanuel Kant adalah perilaku etika yang lahir dan muncul dari desakan kehendak diri manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi, sehingga setiap perilaku etika yang dilakukannya benar-benar lahir dari dirinya sendiri bukan dari luar dirinya.

Dalam beberapa aspek, konseling sebagai pekerjaan sosial secara tidak langsung selalu dikaitkan dengan filsafat etika dan sosial. Hal ini berkaitan erat dengan keyakinan bahwa konselor para pekerjaan sosial harus memiliki seperangkat nilai yang mengandung kebenaran sehingga mereka dapat netral secara etika dan dapat mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-keburuhannya. Terdapat persamaan etikaitas dengan etikaisme, seperti jika tingkah laku etika diartikan menjadi tindakan etikaistik yang mempunyai sisi negatif seperti: prasangka, menghakimi sendiri, dan tidak toleran.

Pekerjaan-pekerjaan sosial, termasuk di bidang konseling adalah propesi yang berdasarkan diri sebagai “disiplin normatif”. Jadi propesi ini berkaitan dengan nilai-nilai etika dan norma sosial yang selalu mengarahkan kepada kebaikan secara sosial. Hal tersebut merupakan normatif yang mempunyai tanggung jawab untuk merubah atau memelihara dunia, baik itu berkenaan dengan dirinya sendiri sebagai konselor maupun konselinya. Durkheim mengamati bahwa ilmu pengetahuan tentang kehidupan sosial memiliki “principal object”, untuk mengidentifikasi dan menerangkan normalitas fakta-fakta sosial serta untuk membedakan apa yang normal dari apa yang patologis dalam suatu masyarakat.

Pengakuan tentang hakikat etika dari pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial dan usaha-usaha pertolongan pekerjaan sosial, dapat membawa seorang konselor kepada suatu proses klasifikasi intelektual serta pentingnya suatu keterbukaan dan kemurnian mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam menolong konseli. Hal ini juga membawa kita untuk lebih baik menghadapi secara langsung berbagai masalah etika dan issue-issue etik dalam tugas pekerja sosial sehari-hari. Selain itu penting kiranya mengakui bahwa kebutuhan-kebutuhan pekerjaan sosial untuk mengembangkan prinsip-prinsip pertolongan yang lain, yang lebih memperhatikan etika dan nilai etika; pada gilirannya akan menghasilkan prosedur dalam proses pertolongan yang efektif, yang lebih empirik, valid, dan ilmiah.

## **PEMBAHASAN**

### **Matras Nilai-Nilai, Norma-Norma Dan Fakta Sosial**

Nilai dan orientasi nilai mengacu kepada konsepsi tentang hal-hal atau karakteristik manusia yang dikehendaki dan terpuji. Nilai-nilai dan orientasi nilai tersebut menampilkan gambaran tentang dunia yang seharusnya, sebagai pedoman dalam melakukan tindakan secara normal. Oleh karena itu, nilai-nilai mengacu kepada sikap yang berkaitan dengan tujuan yang diinginkan dan keadaan yang akan dicapai yaitu secara ideal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia serta keuntungan lainnya bagi orang secara individu maupun kolektif.

Berbagai nilai yang penting diantaranya: kelangsungan hidup individu dan kelompok, pengalaman diri, kebersamaan, penghargaan dan penghormatan diri, kemampuan-kemampuan diri, hal-hal yang bersifat pribadi, prestasi dan perwujudan diri. Nilai yang berhubungan dengan harga diri orang menunjukkan pada kebutuhan akan identitas diri; nilai standar kehidupan dan jaminan penghasilan menunjukkan pada kebutuhan akan kelangsungan hidup; nilai keberhasilan menunjukkan pada hal-hal pribadi orang; serta nilai empati menunjukkan pada kebutuhan untuk mencintai dan kebersamaan.

Pada seluruh atau hampir seluruh masyarakat, menurut Dorothi Lee, apa yang dianggap baik dipertahankan sebagai suatu yang bersifat sosial. Diri sendiri dikembangkan dan ditingkatkan melalui hubungan, partisipasi dan pertukaran sosial. Cinta, penghormatan serta nilai untuk menyatakan cinta, menghormati orang-orang lain, merupakan nilai-nilai yang penting. Florence Kluckhohn mengidentifikasi sejumlah orientasi nilai yang berkaitan dengan masalah kehidupan dasar :

1. Manusia berhubungan dengan alam atau lingkungan fisik, dalam arti mendominasi, hidup dengan atau ditaklukan alam.
2. Manusia menilai sifat/hakikat manusia sebagai baik, atau campuran antara baik dan buruk.
3. Manusia hendaknya bercermin pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
4. Manusia lebih menyukai aktifitas yang seang dilakukan, akan dilakukan, atau telah dilakukan.
5. Manusia menilai hubungan dengan orang lain, dalam kedudukan yang langsung, individualistik, atau posisi yang sejajar.

Orientasi nilai tersebut sangat berbeda diantara berbagai kebudayaan dan sub budaya dalam masyarakat. Orientasi nilai budaya itu dinyatakan dalam konsep-konsep, sikap-sikap, dan harapan-harapan orang, yang bersangkutan-paut dengan diri mereka sendiri atau orang lain, khususnya sebagai bagian dari peranan-peranan sosial yang mereka sandang dalam masyarakat.

Dalam pandangan Pumphrey, nilai-nilai tersebut memiliki strata yang mencerminkan etikaitas dan norma-norma sosial yang harus dilakukan oleh seorang konselor sebagai pekerjaan sosial, diantaranya:

1. Nilai-nilai akhir atau abstrak, seperti: demokrasi, keadilan, persamaan, kebebasan, kadamaian dan kemajuan sosial, serta perwujudan diri dan penentuan diri.
2. Nilai-nilai tingkat menengah, seperti: kualitas keberfungsian manusia/pribadi, keluarga yang baik, pertumbuhan, peningkatan kelompok dan masyarakat yang baik.
3. Nilai-nilai tingkat ketiga merupakan nilai-nilai instrumental atau operasional yang mengacu kepada ciri-ciri perilaku dari lembaga sosial yang baik, pemerintah yang baik, dan orang profesional yang baik. Misalnya dapat dipercaya, jujur, dan memiliki disiplin diri.

Seorang boleh jadi mempunyai jenis-jenis nilai yang asli, adaptif, dan aspirasional, sesuai dengan tingkat keterikatan seseorang terhadap kehidupan mereka melalui nilai-nilai pribadinya. Serangkaian nilai tersebut juga perlu diwujudkan secara konsisten. Nilai-nilai dapat menolong seorang konselor untuk membentuk pola-pola suatu fakta dan mengidentifikasi keberartian (makna) fakta-fakta tersebut. Pentingnya untuk mengakui nilai-nilai tersebut, agar seorang konselor bisa mengetahui keberadaan dan perbedaan fakta-fakta yang sebenarnya. Ditegaskan oleh bullet, bahwa nilai-nilai dan fakta perlu diintegrasikan dalam penampilan tindakan-tindakan pertolongan interventif yang penuh kesadaran.

Malow mengatakan “ peningkatan ketepatan fakta-fakta secara langsung dan simultan akan pula meningkatkan kualitas fakta tersebut yang seharusnya”. Jadi sesuatu yang lebih jelas dilihat atau diketahui, maka kualitasnya seharusnya lebih diperlukan, dan hal ini disebut tindakan-tindakan khusus.

Jadi nilai-nilai terkait erat dengan fakta-fakta. Tetapi komitmen terhadap nilai tidak dapat ditempatkan pada tugas-tugas atau tujuan-tujuan operasional yang realistis, karena dibutuhkan sumber-sumber yang konkrit untuk mencapainya serta perlunya perhatian terhadap keefektifan prosedur-prosedur dan program-program yang dapat

diukur. Frankel mengatakan “ para pekerja sosial dan tenaga-tenaga profesional lainnya menerima dan menghadapi tanggung jawab etika : “tanggung jawab etika yang lebih penting ialah menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk menilai kondisi-kondisi aktual dan akibat akibat dari tujuan yang kita kejar serta meninjau kembali tujuan-tujuan itu bila kita menemukan bahwa tujuan tersebut bukanlah apa yang kita pikirkan atau harapkan”.

Nilai-nilai diterima, dikukuhkan dan dilembagakan dalam masyarakat dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu cara yang dilakukan ialah dalam bentuk norma-norma sosial. Selain itu, norma menjadi peraturan-peraturan sosial yang mengkhususkan apa yang diharapkan atau apa yang boleh, bagaimana, dan kepada siapa tanggung jawab atas peristiwa dan akibat - akibatnya diletakkan. Nilai-nilai dan norma-norma yang telah diinternalisasikan ke dalam diri individu, akan menjadi kerangka referensi individu tersebut, sebagai perinsip-perinsip etik. Prinsip-prinsip etik tersebut menjadi dasar orientasi dan petunjuk bagi seorang pekerja profesional dalam mengatasi masalah- masalah kehidupan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Prinsip etik tersebut membantu pula mengatur dan memberikan makna dan kesatuan yang bulat terhadap kepribadian mereka; motivasi dalam memilih perilaku, tujuan-tujuan dan gaya hidup, serta memungkinkan ia memperoleh landasan pembenaran dan pengambilan keputusan terhadap tindakan yang dilakukan pada konseli.

### **Dimensi Nilai sosial dalam Matras Filsafat Etika**

Perbedaan dan karakteristik filsafat etika dalam bidang konseling sebagai disiplin pekerjaan sosial ditandai oleh serangkaian orientasi nilai-nilai dasar, norma-norma dan prinsip-prinsip etik yang diakui secara umum oleh pekerja-pekerja sosial profesional. Ciri-ciri dimensi nilai sosial tersebut mengungkapkan suatu visi etika dari kehidupan yang baik dan masyarakat yang baik, dimana konseli dan konselor sebagai pekerja sosial itu memikirkan kehidupan ini. Beberapa nilai dan norma telah diterima sebagai petunjuk (pedoman) praktek pertolongan pekerjaan sosial. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Meyer dan McLeod, menggunakan pengukuran terhadap nilai-nilai sosial, dan hasilnya

menunjukkan bahwa pekerja-pekerja sosial profesional mempunyai skor yang lebih nyata terhadap dimensi nilai tertentu, daripada pekerja-pekerja sosial yang tidak terdidik. Dimensi-dimensi ini tersebut adalah :

1. Jaminan kepuasan (versus perjuangan dan penyangkalan)
2. Tanggung jawab kelompok (versus tanggung jawab individu)
3. Ketergantungan (versus kemandirian individual)
4. Inovasi perubahan (versus tradisionalisme)
5. Determinisme kebudayaan (versus keterikatan hakikat manusia)
6. Kegunaan individual (versus tujuan-tujuan sistem)
7. Keanekaragaman gagasan, nilai-nilai, dan gaya hidup (versus keseragaman)
8. Relativisme-pragmatisme (versus pengendalian sosial)
9. Kebebasan pribadi (Versus pengendalian sosial)

Dalam filsafat etikanya, konselor sebagai pekerja sosial harus memberikan perhatian nilai yang lebih besar bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar hidup dan perwujudan diri konseli. Bahkan seorang konselor harus memberi prioritas yang tinggi bagi nilai-nilai pribadi dan sosial tertentu yang idealistik yang meliputi: keberfungsian sosial yang optimal, self determination, dan perwujudan diri, martabat dan harga diri individu, demokrasi, keadilan, persamaan tanggung jawab sosial, dan integritas ekologi.

Cinta adalah nilai dasar bagi pekerja sosial. Bentuk-bentuk cinta yang disebut caritas, agape, atau charity dianggap sebagai yang tertinggi. Gordon Allport, mengemukakan bahwa motif pelayanan pekerja sosial akan senantiasa bersifat caritas dan motif ini benar-benar valid. Charles Loch melukiskan chariti sebagai cinta sosial dan tujuan organisasi amal adalah untuk menggunakan cinta sosial, hasil dan tindakan-tindakannya dipergunakan sebagai alat bagi kebaikan bersama. Cinta adalah mendengar, merespons, dan mentransformasikan cinta, sehingga pekerja sosial dapat mengetahui dan berkomunikasi dengan konseli, serta memperoleh kemedekaan dan merasa diri menjadi berarti.

Salah satu unsur cinta yang berkaitan dengan nilai adalah memperdulikan (*caring*). Mayeroff, mengemukakan “bahwa memperdulikan orang lain dalam arti luas ialah menolongnya untuk tumbuh dan mengaktualisasikan dirinya sendiri”. Nilai lain yang terkait



erat adalah tanggung jawab pribadi dan sosial. Nilai ini mengacu kepada sikap atau perasaan bahwa seseorang konselor itu adalah agen yang berkepentingan dalam memberi perhatian kepada orang lain, yaitu percaya diri dan saling menolong sesuai dengan kemampuan seseorang serta bertindak menurut prinsip-prinsip etika dan mempertanggungjawabkan konsekuensi perilakunya. Tanggung jawab sosial juga mengacu kepada perasaan wajib menolong orang lain atau bertanggung jawab bagi kesejahteraan orang lain. Nilai-nilai dan sikap caritas, keperdulian dan tanggung jawab melahirkan apa yang disebut altruisme. Altruisme berarti tidak mementingkan diri sendiri dan tidak menuntut upah atau bayaran. Jadi berarti perilaku yang benar-benar menolong dan memberi keuntungan bagi orang lain.

Nilai-nilai yang paling dasar ialah kesejahteraan sosial dan pribadi. Kesejahteraan berarti suatu keadaan sejahtera (fisik, mental, sosial, dan ekonomi) pada individu dan masyarakat. Pinker menganggap model-model residual dan institusional dalam kesejahteraan sosial harus berorientasi nilai. Pendekatan residual berdasarkan pada asumsi etika tentang sifat persaingan dan kepercayaan diri; pendekatan institusional, pada sifat kerja sama dan saling menolong. Pinker menekankan pada campuran berbagai motif dalam gagasan kesejahteraan sosial. Aptekar mengatakan bahwa karakteristik nilai yang menyimbolkan pekerjaan sosial profesional ialah keseimbangan: "keseimbangan dalam kehidupan individu, keluarga-keluarga dan kelompok-kelompok dan masyarakat adalah apa yang akan dicapai pekerja sosial dan apa yang akan dilakukan seseorang itu mempunyai nilai.

Nilai pada dasarnya merupakan suatu konsepsi abstrak terdapat pada manusia tentang apa yang dianggap benar salah, indah-tidak indah dan baik buruk. Nilai yang berkaitan dengan benar salah disebut logika, nilai yang berkaitan dengan indah-tidak indah dinamakan estetika, dan nilai yang berkaitan dengan baik buruk disebut etika.

Etika pada dasarnya merupakan penerapan dari nilai tentang baik buruk yang berfungsi sebagai norma atau kaedah tingkah laku dalam hubungannya dengan orang lain, sebagai ekspektasi atau apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap seseorang sesuai dengan status dan peranannya, dan etika dapat berfungsi sebagai penuntun pada setiap orang dalam mengadakan kontrol sosial. Dan etika pekerjaan

sosial merupakan etika profesi yang berfungsi membimbing, mengatur, dan mengendalikan perilaku dalam kapasitas peranan-peranan dan status pekerjaan sosial menggambarkan apa yang diharapkan dari para pekerja sosial di dalam penampilan fungsi-fungsi profesional mereka dan di dalam tingkah laku mereka sebagai anggota profesi pekerjaan sosial. Apa yang diharapkan dari para pekerja sosial dengan cara tingkah laku yang dinilai di dalam fungsi-fungsi dan status profesional didasarkan pada dan berasal dari pekerjaan yang mereka lakukan; untuk siapa dengan siapa mereka bekerja dan dalam setting apa pekerjaan itu dilakukan. Lebih spesifik, berkaitan dengan etika pekerjaan sosial didasarkan pada beberapa premis atau dasar pemikiran tertentu tentang konselor sebagai pekerja sosial dan tentang konseli, dan resiko-resiko bagi konseli.

### **Prinsip-prinsip Praktek Etik**

Prinsip-prinsip praktek etik dituangkan dalam bentuk kode etik profesi, dalam bentuk petunjuk-petunjuk dan kewajiban-kawajiban. Adapun kode etik bagi pekerja sosial termasuk dalam bidang konseling, yaitu :

1. Pekerja sosial mengutamakan tanggung jawab melayani kesejahteraan individu atau kelompok, yang meliputi kegiatan perbaikan kondisi sosial.
2. Pekerja sosial mendahulukan/mengutamakan tanggungjawab profesionalnya ketimbang kepentingan-kepentingan pribadinya.
3. Pekerja sosial tidak membedakan latar belakang keturunan, warna kulit, agama, keturunan, jenis kelamin, warga negara, serta berusaha mencegah dan menghapuskan diskriminasi dalam memberikan layanan, dalam tugastugas serta dalam praktek-praktek kerja.
4. Pekerja sosial melaksanakan tanggung jawab demi mutu dan keluasan pelayanan yang diberikan.

Prinsip-prinsip dasar ini mengalami perubahan sesuai dengan perubahan waktu. Secara umum prinsip tersebut adalah :

- 1) Menghargai dan mempermudah/mewujudkan partisipasi konseli.

- 2) Menghargai keinginan konseli atau anomi atau menentukan nasib sendiri
  - 3) Menghargai martabat dan harkat konseli
- Prinsip-Prinsip Dasar Lainnya adalah :
- a) Penerimaan (acceptance): Pekerja sosial harus menerima konseli apa adanya.
  - b) Individualisasi (individualization): konseli merupakan pribadi yang unik yang harus dibedakan dengan yang lainnya.
  - c) Sikap tidak menghakimi: pekerja sosial harus mempertahankan sikap tidak menghakimi terhadap kedudukan apapun dari konseli dan tingkah lakunya.
  - d) Rasionalitas (rationality): Pekerja sosial memberikan pandangan yang objectif
  - e) dan factual terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, serta mampu mengambil keputusan.
  - f) Empati (emphaty): kemampuan memahami apa yang dirasakan orang lain/ konseli.
  - g) Kejujuran (impartiality): tidak menghadiahi ataupun merendahkan orang lain / konseli (tidak menganakemaskan atau menganaktirikan)
  - h) Ketulusan/kesungguhan (genuiness)
  - i) Kerahasiaan (confidentiality): pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan data/informasi perihal konseli kepada orang lain.
  - j) Mawas diri (self-awarness): pekerja sosial harus sarat akan potensi dan keterbatasannya.

Sedangkan berkaitan dengan isi dan konteks etika pekerjaan sosial. Hal ini berkaitan dengan asumsi dari kualitas profesional merupakan premis utama dari etika pekerjaan sosial. Prinsip-prinsip etika pekerjaan sosial dirancang untuk mencegah pekerja sosial atau menghalangi mereka untuk melakukan eksploitasi, mendukung posisi profesional mereka dalam melayani dan mempengaruhi konseli. Asumsi-asumsi itu adalah:

1. Pemilikan dan Penggunaan Kompetensi Pekerjaan Sosial: Pemilikan dan penggunaan kompetensi pekerjaan sosial disetujui sebagai premis pekerjaan sosial yang positif, para

pekerjaan sosial dan diharapkan untuk mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tidak dimiliki konseli, dan kepada siapa tanggung jawab profesional ditetapkan dan dibebankan dalam hubungan dengan batas-batas etis dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kepentingan konseli mereka.

2. Kerapuhan Konseli Yang Relatif: Kerapuhan konseli yang relatif merupakan premis etika pekerjaan sosial sebagai alasan untuk menetapkan lebih besar tanggung jawab etis bagi pekerja sosial terutama adalah hubungannya dengan konseli yang berada dalam kondisi kerapuhan relatif sebagai penyandang masalah. Konseli memiliki penilaian yang dibatasi oleh keadaannya, oleh sifat –sifat ketidakdewasaan, defisiensi atau disability sangat mungkin menjadi belas kasihan pekerja sosial. Hal ini membuat etika pekerjaan sosial menjadi lebih imperatif.
3. Resiko-Resiko Bagi Konseli: Resiko bagi konseli sebagai suatu premis etika pekerjaan sosial didasarkan pada asumsi bahwa kemungkinan pekerja sosial mengabaikan kebutuhan atau masalah yang menyebabkan konseli mencari pelayanan. Pengabaian mungkin disebabkan oleh penolakan dari pelayanan atau kelalaian atau ketidakmampuan (*inkompetensi*) pelayanan yang diupayakan. Didalam pelayanan konseli juga mempunyai resiko kehilangan nilai-nilai yang konkrit maupun tidak konkrit. Mereka dapat mencabut segala sesuatu yang berhubungan dengan harga diri dan keberuntungan mereka. Suatu alasan yang mendasar untuk mempercayai etika pekerjaan sosial adalah resiko yang inheren di dalam kenyataan bahwa praktek pekerja sosial umumnya tidak observasi oleh yang lainnya.

### **Penutup**

Uraian-uraian di atas apabila dikaitkan dengan bidang konseling sebagai pekerja sosial merupakan pijakan untuk membangun kerangka etik profesi konselor. Paling tidak, kerangka etik konselor yang dapat dicerap dalam analisa atas dimensi nilai filsafat etika meliputi:

*Pertama*, pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada konseli harus mempergunakan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang

sudah teruji kevaliditasannya. Elemen pengetahuan pekerjaan sosial menurut asosiasi sekolah-sekolah pekerja sosial di Amerika Serikat (1944), adalah social casework, Social groupwork, community organization, social research and statistic, social welfare administration, public welfare and child welfare, medical information dan psychiatric information.

*Kedua*, kerangka nilai (*body of value*). Konsep nilai banyak dibahas dalam literatur pekerjaan sosial, karena nilai mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam melaksanakan praktek pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya dipengaruhi oleh nilai-nilai, diantaranya: a) Nilai masyarakat (*societal values*), praktek pekerjaan sosial selalu berdasarkan kepada nilai-nilai masyarakat, karena profesi pekerjaan sosial mendapatkan misi untuk melaksanakan sebagian dari fungsi masyarakat. Oleh sebab itu praktek pekerjaan sosial akan mengambil dan dipengaruhi oleh nilai masyarakat. Jadi profesi pekerjaan sosial harus selaras dengan nilai-nilai masyarakat; b) Kode etik, kode etik merupakan rumusan tuntunan tentang perilaku yang dianggap baik dan yang perlu ditunjukkan oleh anggota profesi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tujuan dan fungsi kode etik adalah : 1) melindungi reputasi profesi dengan jalan memberikan kriteria yang dapat diikuti untuk mengatur tingkah laku anggotanya, 2) Meningkatkan kompetensi dan kesadaran tanggung jawab bagi para anggota dalam melaksanakan praktek, 3) melindungi masyarakat dari praktek yang tidak kompeten. Kode etik pada dasarnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan proses pertolongan pekerjaan sosial yang mencakup pekerja sosial, konseli, teman sejawat, badan sosial tempat pekerja sosial bekerja, profesi pekerja sosial dan masyarakat tempat proses pertolongan diberikan; c) Agency Purpose (tujuan lembaga dimana pekerja sosial bekerja), Pekerja sosial harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam lembaga dimana pekerja sosial tersebut bekerja; d) Teori, teori dianggap baik jika dapat berfungsi sebagai nilai. Setiap teori dari suatu profesi mempunyai nilai. Nilai teori pekerjaan sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1) nilai tentang konsepsi orang, 2) nilai tentang masyarakat, 3) nilai yang berkaitan dengan interaksi antar orang. Literatur pekerjaan sosial menyatakan bahwa pekerja sosial yang berinteraksi dengan konselinya harus didasarkan kepada prinsip-prinsip:

individualization, purposeful expression of feeling, controlled emotional involvement, acceptance, nonjudgmental attitude dan self determination.

*Ketiga*, kerangka keterampilan (body of skill). Profesi tidak hanya membahas teori saja, tetapi berkaitan dengan penerapan atau praktek. Penerapan suatu teori atau knowledge membutuhkan skills, sehingga setiap profesi perlu menuntut skill. Skill merupakan perpaduan antara Body of knowledge dan Body of value. Keterampilan merupakan komponen penting dalam rangka referensi pekerjaan sosial. Sebab keterampilan pada perinsipnya merupakan alat untuk mamadukan karangka p engetahuan dan kerangka nilai. *Naomi I. Brill, menyatakan bahwa keterampilan-keterampilan pekerjaan sosial adalah : 1) Differential diagnosis, 2) Timing, 3) Partialization, 4) Focus, 5) Estabilishing partnership, 6) structure.*

Differential diagnosis, manusia pada dasarnya unik, artinya manusia satu berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu permasalahan manusia yang satu berbeda dengan yang lain. Pekerja sosial diharapkan mampu mendiagnosa perbedaan tersebut. Keterampilan Differential Diagnosis (DD) adalah keterampilan atau kemampuan pekerja sosial untuk memahami keunikan konseli, masalah dan situasi sosial.

Timing, Disini berarti pekerja sosial harus mempunyai keterampilan untuk merencanakan dan menggunakan waktu secara tepat. Timing mengacu kepada dua hal, yaitu : 1) The personal Tempo, dan 2) Tide in the affair of men.

Partialization, pekerja sosial harus mempunyai keterampilan untuk memisahmisahkan, yaitu mengelompokkan, mengklasifikasikan, merealisasikan, menganalisis dan menginteprestasikan masalah termasuk didalamnya kemampuan menentukan prioritas utama tentang kebutuhan konseli.

Focus, masalah sosial mempunyai banyak dimensi dan masing-masing saling berinteraksi. Untuk itu pekerja sosial harus mampu memfokuskan salah satu dimensi sebagai point of entery. Keterampilan ini juga berkaitan dengan kemampuan pekerja

sosial dan konseli mengkonsentrasikan kegiatannya terhadap aspek-aspek yang berpengaruh terhadap permasalahan dan situasi konseli.

Estabilishing partnership, kemampuan ini menunjukkan kepada kemampuan pekerja sosial dalam mengajak konseli maupaun orang-orang atau sistem sosial yang terkait dalam usaha pemecahan masalah. Pihak-pihak yang terkait tersebut adalah : 1) sistem konseli, 2) sistem sasaran, 3) sistem kegiatan dan 4) sistem pelaksana perubahan.

Structure, structure berkaitan dengan setting dan batas-batas pelayanan, disini ditentukan dapat tidaknya suatu kegiatan dilakukan, kapan dan dimana dilakukan. Keterampilan structure juga menyangkut kemampuan pekerja sosial dalam mengkaitkan peranan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pertolongan. Kemampuan didalam melaksanakan prinsip pembagian habis tugas dan prinsip penempatan orang sesuai dengan keahliannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Compton, Beullah R & Bud Galaway. 1979. *Social Work Processes*. Illinois : The Dorsey Press.

Hardy, Jean.1981. *Values in Social Policy : Nine Contradiction*. London : Routledge & Kegan Paul.

Husain Heryanto, 2000, *Paradigma Holistik: Dialog Filsafat, sains, dan Kehidupan Menurut Sadra dan Whitebeed*, Teraju, Bandung

Klenck, Robert (ed).1977. *Social Work Practice*. New York : Prentice Hall.

Levy, Charles S. 1993. *Social Work Ethics on the Line*. New York : The Haworth Press.

Mohammad Sabri, 1999, *Keberagamaan yang Saling Menyapa: Perspektif Filsafat Perennial*, Ittaqa Press, Yogyakarta